

ABSTRAK

Pencampuradukan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara perdata kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua jenis gugatan ini memiliki karakteristik, dasar yuridis, serta pembuktian yang berbeda. ketidakjelasan dalam penyusunan posita dan *petitum* dapat menimbulkan gugatan kabur atau tidak dapat diterima. Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, belum terdapat pedoman formil yang mengatur penyusunan gugatan dengan dasar ganda. Hal ini memunculkan permasalahan terkait bagaimana hakim menilai dan memutus perkara yang mengandung unsur wanprestasi dan PMH serta sejauh mana SEMA No. 1 Tahun 2022 mampu mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis dilakukan dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, serta menilai penerapan kepastian hukum dalam putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum SEMA No. 1 Tahun 2022, pencampuradukan dasar gugatan sering berakhir dengan putusan yang menyatakan gugatan kabur atau tidak dapat diterima, sehingga menghambat perlindungan hukum. Setelah diberlakukannya SEMA, hakim memiliki pedoman formil untuk membedakan dalil wanprestasi dan PMH, sehingga meminimalisir multitafsir dan meningkatkan konsistensi putusan. Dengan demikian, SEMA No. 1 Tahun 2022 berperan penting dalam menegakkan *due process of law* dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Ganda, SEMA No. 1 Tahun 2022.

ABSTRACT

The conflation of breach of contract claims and tort (unlawful act) claims in civil disputes often leads to legal uncertainty. These two types of claims have different characteristics, legal grounds, and standards of proof. Ambiguity in drafting the *posita* and *petitum* may result in lawsuits being declared vague or inadmissible. Before the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022, there was no formal guideline regulating the drafting of lawsuits with dual legal grounds. This raised problems regarding how judges assess and decide cases involving both breach of contract and tort, as well as to what extent SEMA No. 1 of 2022 can ensure legal certainty.

This study employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The data sources consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, and secondary legal materials in the form of legal literature and journals. The analysis elaborates the applicable legal norms and evaluates the application of legal certainty in judicial decisions.

The findings show that prior to SEMA No. 1 of 2022, the conflation of legal grounds often ended with judgments declaring lawsuits vague or inadmissible, thereby hindering legal protection. After its enactment, judges gained a formal guideline to distinguish between breach of contract and tort claims, minimizing multiple interpretations and enhancing consistency of rulings. Thus, SEMA No. 1 of 2022 plays a crucial role in upholding the due process of law and strengthening legal certainty in civil dispute resolution.

Keywords: Legal Certainty, Breach of Contract, Tort, Dual Claims, SEMA No. 1 of 2022.